

# PAD dan Pembiayaan Pembangunan

Forum Diskusi  
DPRD Kabupaten Kebumen  
Hotel Jayakarta, Jogja,  
25 Nov 2011



Dr. Wahyudi Kumorotomo  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

# MASALAH UMUM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

1. Kebutuhan anggaran (*fiscal need*) dan kapasitas anggaran (*fiscal capacity*) tidak seimbang
2. Tanggapan negatif atas layanan publik.  
Rendahnya ketaatan membayar pajak/retribusi
3. Lemahnya infrastruktur, sarana, dan sumberdaya manusia
4. Berkurangnya subsidi dari pusat
5. Potensi PAD belum mencerminkan kondisi riil.

# SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH

(Pasal 31 UU No.32/2004)

## **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):**

- Pajak daerah
- Retribusi
- Laba perusahaan daerah
- Pendapatan lain-lain yang sah

## **2. Perimbangan keuangan:**

- Bagian dari PBB
- Bagian dari BPHTB
- Bagian dari pendapatan sumberdaya alam
- Dana Alokasi Umum DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)

## **3. Pinjaman Daerah**

## **4. Pendapatan lain-lain**

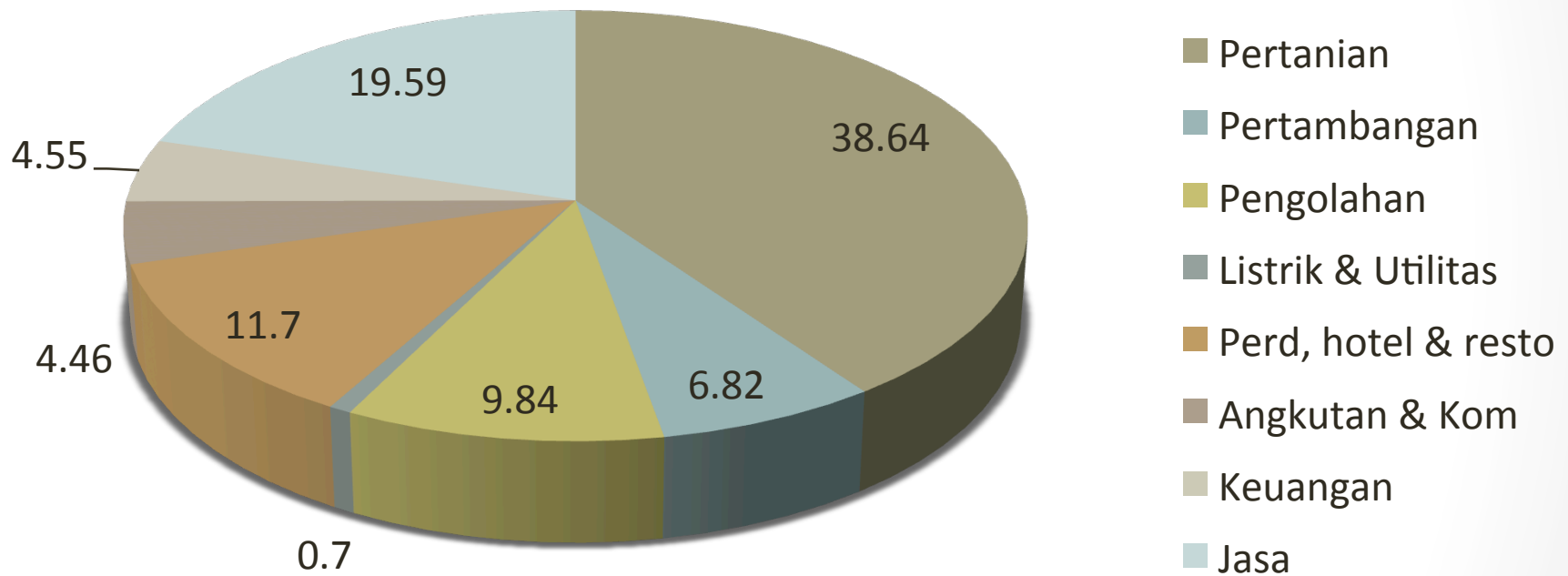
# Dasar Hukum

1. UU No.32/2004 ttg Sistem Pemerintahan Daerah
2. UU No.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pusat-Daerah
3. UU No.28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Permendagri No.21/2011 ttg Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

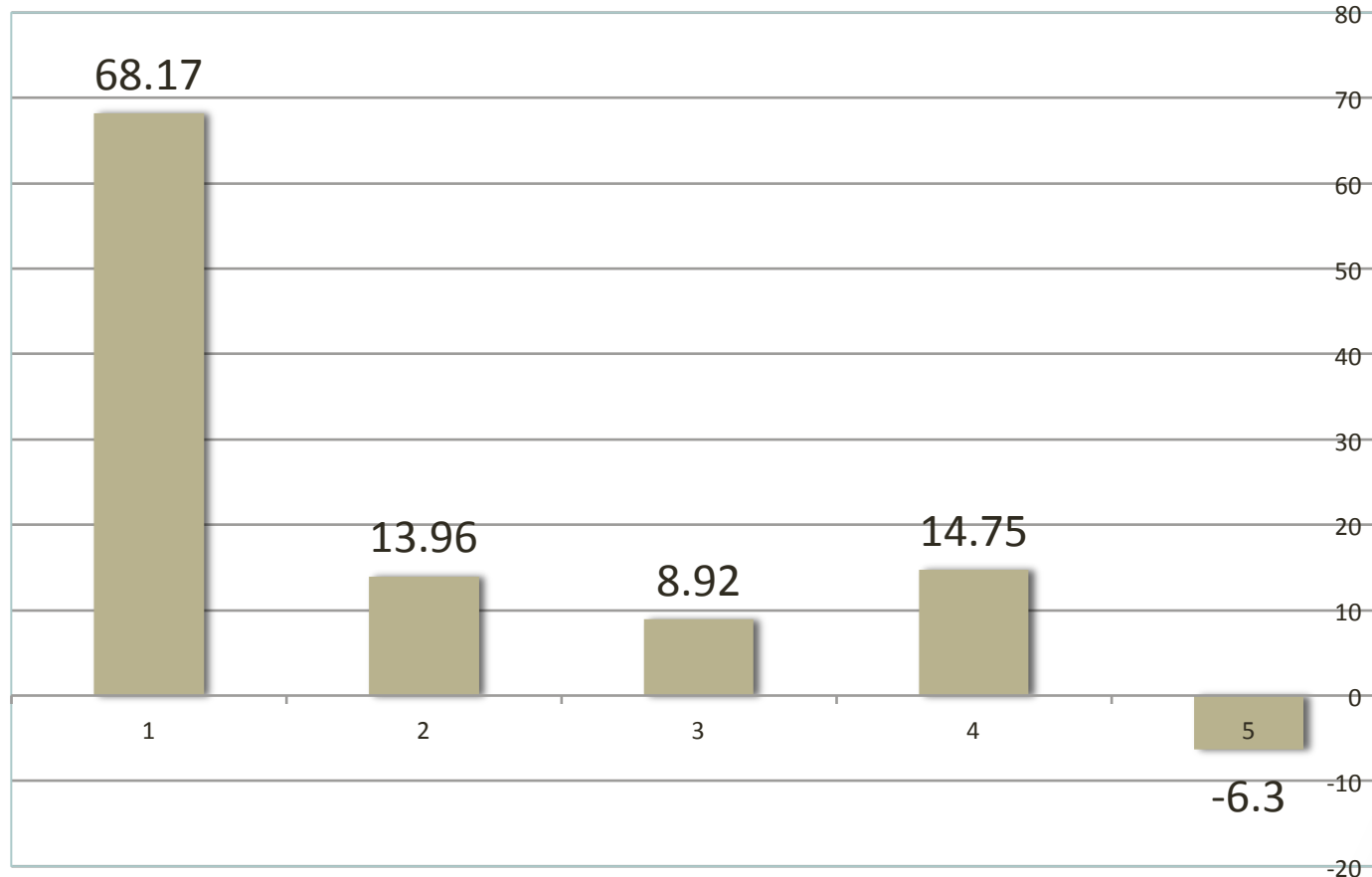
# APBD Kebumen 2011

Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
<b>Total Pendapatan</b>		1,140,548	98.81
	Pendapatan Asli Daerah	68,321	5.92
	Dana Perimbangan	858,148	74.35
	Pajak Daerah	14,234	1.23
	Retribusi Daerah	16,804	1.46
	Lain-lain Pendapatan	34,725	3.01
<b>Total Belanja</b>		1,154,243	<b>100.00</b>
Belanja Tidak Langsung		834,516	72.30
	Belanja pegawai	747,490	64.76
	Hibah	9,246	0.80
	Bantuan sosial	33,689	2.92
	Bantuan keuangan	40,863	3.54
	Belanja tidak terduga	1,551	3.79
Belanja Langsung		319,727	27.70
	Belanja pegawai	41,671	3.61
	Belanja barang & jasa	132,482	11.48
	Belanja modal	145,574	12.61
Pembiayaan Daerah		13,694	1.19
	SiLPA	15,657	1.36
	Pengeluaran	8,963	0.78
<b>Defisit</b>		(13,694)	-1.19

# Penyumbang PDRB Kab Kebumen th 2008 (dalam %)



# Pertumbuhan PAD Kebumen Dalam 5 Tahun Terakhir (%)



# Kesenjangan Potensi vs. Realisasi: Mengapa?

1. Estimasi potensi lebih rendah dari semestinya
2. Sistem & prosedur pemungutan yg lemah, strategi kurang sesuai dengan faktor internal & eksternal yg dihadapi
3. Sistem perhitungan potensi, sistem & prosedur pemungutan yg lemah.



# Kebutuhan Data PAD

- Faktor yg mudah dikendalikan (*controllable factors*): kebijakan, kelembagaan, SDM
  - Faktor yg sulit dikendalikan (*uncontrollable factors*): kondisi ekonomi nasional, geografis, budaya.
- Data umum: a) komposisi industri; b) struktur sosial-politik, institusi; c) kemampuan administratif, integritas aparat; d) ketimpangan distribusi pendapatan.
- Strategi umum: a) Perluas objek dan subjek pajak atau retribusi; b) Tingkatkan besarnya penetapan; c) Kurangi tunggakan pajak-retribusi.

# Permendagri No.21/2011 ttg Pengl. Keu. Daerah

1. Hak daerah memungut pajak daerah, retribusi daerah, melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah dlm hal keuangan, membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan & pengeluaran daerah
4. Kekayaan daerah yg dikelola sendiri atau pihak lain (surat berharga, piutang, barang, kekayaan yg dipisahkan dr BUMD)
5. Kekayaan pihak lain yg dikuasai Pemda dlm penyelenggaraan tugas Pemda & kepentingan umum
6. BOS → masuk ke APBD, bukan lagi dana vertikal
7. PBB & BPHTB adalah pajak daerah
8. Bantuan sosial → supaya utk kegiatan produktif yg meningkatkan kesejahteraan rakyat.

# UU ttg Pajak & Retribusi

## (UU 34/2000 & UU 28/2009); Pajak Baru?

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
3. Objek & dasar pengenaan tidak bertentangan dg kepentingan umum
4. Bukan objek pajak Provinsi/Pusat
5. Potensinya memadai
6. Tidak berdampak negatif thd ekonomi
7. Memperhatikan keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

# PELUANG SINKRONISASI

UU No.33/2004 dg UU 28/2009 ttg Pajak & Retribusi Daerah

1. Desentralisasi fiskal akan lebih bermakna; tantangan bagi kapasitas administrasi perpajakan di daerah
2. Daerah dpt menggali sumber potensial. Misal:
  - Bali: Visa on arrival, airtime, dana CD dari hotel besar
  - Bontang, Balikpapan, Nunukan: bagi hasil tambang, dana CD perusahaan minyak
  - Kebumen: pajak sarang burung; Masih potensial?
  - Sleman: retribusi pondokan, retribusi BTS
  - Kalimantan Tengah: IHPH.
3. Potensi PAD akan langsung terkait dengan kebutuhan belanja dan pelayanan umum di daerah.

# ANALISIS BASIS EKONOMI MAKRO DAERAH

## 1. Area demografi;

Sektor apa yg jadi dasar pengembangan ekonomi, target populasi

## 2. Kondisi pasar tenaga-kerja;

Ketersediaan tenaga-kerja & kualitasnya

## 3. Karakteristik ekonomi;

Penyangga pertumbuhan dan potensi daerah

## 4. Tata-ruang dan kekayaan alam;

Struktur kota menentukan pengembangan lebih lanjut

## 5. Pelayanan publik;

Rencana pembangunan harus mendukung kualitas hidup

# Bagi Hasil Pajak (BHP)

NJOP < 1 miliar;

$PBB = 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$

NJOP > 1 miliar;

$PBB = 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$

$BPHTB = 5\% \times (NPOP - NPOPTKP)$

- 0,5% adalah tarif PBB
- 20% dan 40% adalah Nilai Jual Kena Pajak (*Assessment Value Ratio*)
- NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah perkiraan harga pasar tanah atau bangunan
- NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak)
- NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

Masalah:

- PBB objeknya di daerah dan sekarang menjadi pajak daerah (Berdasarkan UU 28/2009). Apakah Kebumen mampu mengelolanya?
- Rendahnya perkiraan nilai jual TB, NJOP >< harga pasar
- BPHTB tidak dilaporkan dg harga pasar; pelaku transaksi menggunakan NJOP untuk pelaporan NPOP.

# Gunakan Teknik Penilaian Potensi Yang Sistematis

## Contoh METODE PERHITUNGAN MIKRO

### Pajak Hotel

Rumus:

$$\Sigma Rrh \times RrLK \times 30 \times 12 \times 10\%$$

Rrh	:	rerata tingkat hunian
RrLK	:	rerata pengeluaran tamu untuk layanan kamar
30	:	jumlah hari
12	:	jumlah bulan dalam setahun
10%	:	tarif pajak maksimum

Data yang diperlukan:

Jumlah kamar

Jumlah tamu

Tingkat hunian

Rerata waktu menginap (*length of stay*)

Rerata pengeluaran

Tarif resmi hotel

Musim kunjungan tamu (ramai, sedang, sepi)

Jumlah pajak yang dibayarkan.

# Apa yg dapat digali dari Wisata?





# Masalah di Kebumen (?)

1. Sarang burung Walet masih potensial? (Target PAD Rp 600 jt → hingga Juni 2011 baru mencapai Rp 94 jt). Apakah ada alternatif potensi PAD yg lain?
2. Pajak & retribusi dipengaruhi dari investasi dari luar daerah. (Menurut HIPMI: regulasi bagi investasi di Kebumen belum kondusif. Mis: ttg IMB, kejelasan prosedur, tarif yg transparan, penggunaan TIK utk lelang, dsb)
3. Retribusi hutan rakyat hasilkan Rp 500,7 jt. Cukup potensial? Bgm dg pelestariannya?
4. Sektor pariwisata (perd, hotel & resto) menyumbang PDRB cukup besar (11,7%). Apakah Pemda punya kebijakan yg terarah bagi sektor ini?
5. Kemiskinan tinggi (25,73%) dan kualitas pendidikan rendah (29,2% tdk tamat SD; 43,8% hanya berijazah SD). Bgm pemerintah memecahkan masalah ini?

# Strategi Peningkatan PAD

1. Tingkatkan kemampuan ekonomi masy. dari sektor andalan
2. Seimbangkan insentif & disinsentif untuk menjamin kepatuhan → peran legislatif?
3. Efisiensi pelayanan publik
4. Kendalikan KKN dlm sistem pemungutan
5. Tingkatkan jaminan keadilan bagi wajib pajak/retribusi
6. Bedakan kebijakan pajak (*tax*) & retribusi (*service charge*) secara jelas
7. Tingkatkan kemampuan administrasi: pendataan, analisis potensi, penetapan, penagihan, keberatan & dispensasi, pengawasan, penegakan hukum.

Peningkatan PAD semestinya bukan hanya sarana untuk memperbesar APBD, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kebumen.

Fokuskan perhatian bukan hanya pada aspek pendapatan, tetapi juga belanja APBD.

**TERIMA KASIH**